



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
x	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS



Plt Gubernur menerima penghargaan dari kepala BPK

Banyak Temuan BPK, Plt Gub Evaluasi OPD

RBI, BENGKULU - Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu, Dr drh H Rohidin Mersyah MMA akan mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah yang masih bermasalah. Dimana dari hasil pemeriksaan BPK kemarin, masih adanya beberapa OPD yang belum mengikuti rekomendasi dari BPK. Diantaranya dari kelebihan pembayaran, urusan laporan hingga lainnya. "Kita akan evaluasi, mana yang akan kita perbaiki sistemnya," ujar Plt Gubernur. Dirinya juga menambahkan bentuk pendampingan audit atas LKPD dari BPK Perwakilan Bengkulu ini jelas memberikan harapan didapatnya Opini WTP di tahun ini.

BACA HALAMAN 7..

SAMBUNGAN HAL 1...

Karenanya, diharapkan komitmen dan respon baik dari setiap OPD dalam pelaksanaan audit keuangan. Dan jika didapati temuan kerugian atas kas daerah, setiap OPD juga diminta untuk menindaklanjuti secara bijak tanpa menimbulkan masalah lain dikemudian hari.

"Maka menjadi sebuah keharusan Pimpinan OPD siap untuk mendampingi, memberikan data dan informasi serta siap melakukan klarifikasi terkait audit keuangan. Sehingga apa yang dikerjakan itu sesuai dengan dokumen, dipastikan tidak akan bermasalah," tambahnya Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Dalam audit keuangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Keuangan BPK, Kepala OPD harus mengetahui secara pasti hal apa saja yang dibutuhkan dalam proses audit. Selain itu, jika ditemukan kejanggalaan maka segera meminta masukan dari BPK untuk solusi terbaik. "Kalau dalam bahasa praktisnya itu belanjakan apa yang ada dalam dokumen, dokumentasikan apa yang kita belanjakan. Dan Pimpinan OPD pastikan mengikuti proses-proses dan paham terhadap pemeriksaan," pungkasnya.

Penyerahan WTP

Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi

Bengkulu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2017 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis. Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Yuan Candra Djaisin kepada DPRD Provinsi dan Plt Gubernur Bengkulu.

Yuan mengatakan walaupun pemerintah provinsi Bengkulu telah mencapai keberhasilan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Temuan BPK yang pertama adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, antara lain kesalahan penganggaran dan penyajian belanja barang dan jasa dan belanja modal pada 19 OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, perencanaan dan pelaksanaan investasi pemerintah Provinsi Bengkulu selaku pemegang saham pengendali (PSP) pada Bank Bengkulu belum optimal, dan penatausahaan aset tetap dan penyerahan aset SMA/SMK dari kabupaten/kota belum memadai dan terdapat permasalahan aset tetap peralatan dan mesin yang telah diungkapkan dalam LHP BPK sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti. Selain itu, BPK juga mendapatkan temuan pemeriksaan menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat kelebihan pembayaran upah pada kegiatan pemeliharaan jembatan Provinsi Bengkulu, kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun dan kegiatan optimalisasi fungsi sungai yang

menjadi kewenangan provinsi serta kelebihan pembayaran pekerjaan dan potensi kerugian pada kegiatan peningkatan jalan, denda keterlambatan yang belum dipungut, dan jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan pada 26 paket kegiatan pada empat OPD. "Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan karena sampai dengan akhir pemeriksaan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan pengembalian dan pemulihan kerugian daerah yaitu melalui penyetoran ke kas daerah dengan jumlah yang cukup signifikan. Sehingga, nilai kerugian tersisa masih dibawah ambang batas toleransi dan tidak berpengaruh terhadap opini," ungkap Yuan.

Selanjutnya, BPK meminta pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Menanggapi capaian WTP Pemerintah Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah selaku Plt Gubernur Bengkulu mengungkapkan apresiasinya atas pengelola keuangan daerahnya. "Saya mengapresiasi pengelolaan keuangan daerah dan termasuk anggota dewan yang telah mendukung dengan luar biasa kepada kami sehingga bisa mendapatkan capaian WTP," ucap Rohidin. Plt Gubernur berharap kedepannya dapat mempertahankan capaian ini untuk tahun-tahun berikutnya. "Semoga ini dapat menjadi motivasi pemerintahan daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban," imbuhnya. (Cw1)